

Islam dan Kehidupan Bernegara: Analisis Politik dan Sosial

Fadhlan

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email Corresponding Author: udofadhlan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Islam dalam kehidupan bernegara dari perspektif politik dan sosial, dengan pendekatan sosiologis dan metode studi pustaka. Islam sebagai sistem nilai tidak hanya berfungsi dalam ranah spiritual, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk struktur politik dan sosial masyarakat Indonesia. Dalam dimensi politik, Islam hadir melalui partai politik, organisasi keagamaan, dan wacana publik yang memengaruhi arah kebijakan dan partisipasi demokratis. Sementara itu, dalam dimensi sosial, Islam membentuk solidaritas, identitas kolektif, serta mekanisme keadilan sosial melalui institusi dan praktik keagamaan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun nilai-nilai Islam memiliki potensi besar dalam mendukung kehidupan bernegara yang adil dan berkeadaban, terdapat ketegangan antara idealisme keislaman dan realitas sosial-politik yang kompleks, seperti pluralisme, sekularisasi, dan politik identitas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang moderat dan inklusif agar Islam dapat berkontribusi secara konstruktif dalam pembangunan masyarakat demokratis yang menjunjung tinggi nilai spiritual dan kemanusiaan.

Kata Kunci: *Islam dan Politik, Keadilan Sosial Islam, Sosiologi Agama.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of Islam in state life from political and social perspectives, using a sociological approach and library research method. Islam, as a comprehensive value system, functions not only in the spiritual realm but also plays a significant role in shaping the political and social structures of Indonesian society. In the political dimension, Islam manifests through political parties, religious organizations, and public discourse that influence policy direction and democratic participation. Meanwhile, in the social dimension, Islam fosters solidarity, collective identity, and mechanisms of social justice through religious institutions and daily practices of the Muslim community. The study finds that although Islamic values have great potential to support a just and civilized state life, tensions remain between Islamic idealism and the complex socio-political realities, such as pluralism, secularization, and identity politics. Therefore, a moderate and inclusive approach is needed

for Islam to contribute constructively to the development of a democratic society that upholds spiritual and humanitarian values.

Keywords: Islam and Politics, Islamic Social Justice, Sociology of Religion.

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan politik telah lama menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak hanya sebagai sistem kepercayaan, Islam juga berfungsi sebagai kekuatan sosial yang membentuk nilai, norma, dan perilaku kolektif. Dalam konteks kehidupan bernegara, ajaran Islam sering kali menjadi landasan moral dan etika dalam pengambilan keputusan politik maupun dalam pembentukan kebijakan publik. Namun, hubungan antara Islam dan negara tidak selalu berjalan harmonis, melainkan penuh dinamika dan tantangan yang kompleks.

Di Indonesia, wacana mengenai peran Islam dalam kehidupan bernegara terus berkembang, terutama sejak era reformasi yang membuka ruang lebih luas bagi ekspresi politik berbasis agama. Munculnya partai-partai Islam, gerakan sosial keagamaan, serta tuntutan penerapan syariat di beberapa daerah menunjukkan bahwa Islam tidak hanya hadir di ruang privat, tetapi juga aktif dalam ruang publik. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan sosiologis mengenai bagaimana agama dapat berperan dalam sistem politik yang demokratis dan pluralistik, serta bagaimana masyarakat merespons intervensi agama dalam ranah kenegaraan.

Selain aspek politik, dimensi sosial dari Islam juga memainkan peran penting dalam membentuk struktur dan dinamika masyarakat. Praktik keagamaan seperti shalat berjamaah, zakat, dan kegiatan majelis taklim menjadi sarana pembentukan solidaritas sosial dan identitas kolektif. Namun, dalam praktiknya, terdapat ketegangan antara nilai-nilai keislaman dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan, ketimpangan, dan konflik antar kelompok. Hal ini menuntut kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana Islam sebagai sistem nilai berinteraksi dengan kondisi sosial yang kompleks.

Dalam konteks sosiologi, penting untuk memahami bagaimana agama, khususnya Islam, berfungsi sebagai agen perubahan sosial dan politik. Apakah Islam mendorong partisipasi politik yang inklusif, atau justru memperkuat eksklusivisme identitas? Bagaimana nilai-nilai Islam diterjemahkan dalam praktik kebijakan publik dan kehidupan sosial sehari-hari? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi relevan untuk dijawab guna memahami peran agama dalam membentuk arah kehidupan bernegara yang adil dan berkeadaban (Khamim, et al., 2024).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis peran Islam dalam kehidupan bernegara dari perspektif politik dan sosial. Dengan pendekatan sosiologis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan

antara agama dan negara, serta implikasinya terhadap pembangunan masyarakat yang demokratis, inklusif, dan berlandaskan nilai-nilai spiritual.

METODE

Dalam penelitian berjudul "Islam dan Kehidupan Bernegara: Analisis Politik dan Sosial", metode yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih karena relevan untuk menggali dan menganalisis berbagai literatur, dokumen, dan sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan tema Islam dan kehidupan bernegara, baik dari perspektif politik maupun sosial. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk menelusuri pemikiran-pemikiran para ahli, teori-teori sosiologi, serta pandangan keislaman yang telah terdokumentasi dalam buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber digital lainnya (Assingkily, 2021). Dengan pendekatan ini, peneliti dapat membangun kerangka konseptual yang kuat dan mendalam, serta mengidentifikasi pola-pola pemikiran yang berkembang dalam diskursus akademik mengenai hubungan antara agama dan negara.

Lebih lanjut, studi pustaka memberikan ruang bagi peneliti untuk melakukan analisis kritis terhadap berbagai sumber yang telah ada, baik yang bersifat klasik maupun kontemporer. Dalam konteks kajian sosiologi, metode ini sangat berguna untuk memahami dinamika sosial politik yang melibatkan Islam sebagai aktor ideologis dan kultural dalam kehidupan bernegara. Peneliti dapat membandingkan berbagai perspektif, mengidentifikasi kesenjangan teoritis, serta merumuskan sintesis baru yang relevan dengan konteks masyarakat Indonesia. Selain itu, studi pustaka juga memungkinkan peneliti untuk menghindari bias empiris dan lebih fokus pada konstruksi teoritis yang mendalam, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam pengembangan ilmu sosiologi, khususnya dalam kajian agama dan negara (Kusmadina, et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Peran Politik Islam di Indonesia

1. Islam dalam Perjuangan Kemerdekaan

Sejak awal kedatangan Islam di nusantara, kaum Muslim telah berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perjuangan melawan penjajahan. Dalam konteks sejarah, tokoh-tokoh Islam seperti HOS Cokroaminoto dan KH Ahmad Dahlan menjadi penggerak utama dalam pergerakan nasional. Mereka memanfaatkan nilai-nilai Islam untuk menggalang semangat perlawanan terhadap penjajahan, dengan mengedepankan narasi kebangkitan umat dan persatuan sebagai kekuatan yang mampu melawan penindasan.

Dalam hal ini, Islam bukan hanya menjadi identitas spiritual, tetapi juga menjadi landasan moral dan politik yang menggerakkan rakyat untuk berjuang

demokrasi. Lebih jauh lagi, kontribusi kaum Muslim dalam perjuangan kemerdekaan juga terlihat melalui organisasi-organisasi Islam yang muncul pada masa itu. Sarekat Islam, misalnya, menjadi salah satu organisasi yang berperan penting dalam mengorganisir perlawanan terhadap penjajah, serta memperjuangkan hak-hak rakyat. Dengan memanfaatkan jaringan yang ada, organisasi ini mampu menggali dukungan luas dari masyarakat, sehingga menciptakan kesadaran kolektif untuk berjuang demi kemerdekaan. Melalui berbagai bentuk kegiatan sosial dan politik, mereka berhasil membangkitkan semangat nasionalisme yang berbasis pada identitas keagamaan, yang kemudian menjadi landasan bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia.

2. Peran Partai Islam di Era Demokrasi Parlementer

Setelah meraih kemerdekaan, Indonesia memasuki era demokrasi parlementer yang memberikan ruang bagi partai-partai politik, termasuk partai berbasis Islam, untuk berperan aktif. Masyumi, sebagai salah satu partai Islam utama, berhasil meraih dukungan yang signifikan dalam pemilu pertama pasca kemerdekaan. Dalam konteks ini, partai-partai Islam berusaha mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam kebijakan pemerintah, agar pencapaian keadilan dan kesejahteraan sosial dapat terwujud. Namun, tantangan muncul ketika berbagai kelompok tidak sepakat mengenai bagaimana menerapkan nilai-nilai tersebut dalam konteks politik. Persaingan antarpihak dan perbedaan pandangan tentang ideologi, strategi, dan agenda politik menyebabkan dinamika yang kompleks dalam praktik politik di Indonesia.

Selain itu, keberadaan partai-partai Islam di era ini juga menandai upaya untuk menjembatani antara nilai-nilai agama dan kebutuhan politik masyarakat. Partai-partai ini berusaha untuk menghimpun aspirasi umat Islam dan menerjemahkannya ke dalam kebijakan publik yang dapat diterima oleh semua kelompok. Namun, perdebatan mengenai identitas politik Islam dan bagaimana seharusnya nilai-nilai tersebut diinterpretasikan sering kali menimbulkan ketegangan, baik di dalam partai itu sendiri maupun dengan partai-partai lain. Hal ini menciptakan tantangan bagi partai-partai Islam untuk tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan dinamika politik yang terus berubah.

3. Dinamika Islam Politik di Masa Orde Baru

Di bawah rezim Orde Baru, partai-partai Islam mengalami tekanan yang cukup besar, dengan kebijakan pemerintah yang cenderung sekuler dan mengekang kebebasan politik. Dalam situasi ini, partai-partai Islam terpaksa melakukan adaptasi dengan mengubah strategi politik mereka. Meski banyak yang berusaha untuk mempertahankan eksistensi, mereka harus berhadapan dengan kebijakan yang mengekang partisipasi politik mereka. Namun, meskipun dalam kondisi terbatas, semangat umat Islam untuk berkontribusi

dalam politik tetap ada. Banyak organisasi keagamaan berusaha untuk tetap menjadi suara bagi umat, meskipun harus berada dalam batasan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dinamika ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk mendelegitimasi peran Islam dalam politik, nilai-nilai keislaman tetap berakar kuat di masyarakat. Dalam konteks ini, banyak tokoh dan pemimpin umat Islam yang berusaha mencari celah untuk tetap berpengaruh, baik melalui jalur formal maupun informal. Mereka melakukan pendekatan dengan berbagai elemen masyarakat untuk membangun solidaritas dan memastikan bahwa suara umat Islam tetap terdengar. Meskipun dihadapkan pada tantangan besar, usaha ini mencerminkan ketahanan dan komitmen umat Islam untuk tetap berperan dalam proses politik, bahkan dalam situasi yang tidak menguntungkan.

4. Kebangkitan Politik Islam Pasca Reformasi

Pasca reformasi 1998, Indonesia mengalami transformasi politik yang signifikan, di mana kebebasan berekspresi dan berorganisasi kembali terbuka lebar. Munculnya kembali partai-partai Islam dalam arena politik menandai kebangkitan politik Islam yang sebelumnya tertekan. Partai-partai seperti PKB dan PPP mulai mendapatkan kembali dukungan masyarakat, yang melihat mereka sebagai representasi aspirasi umat Islam.

Dalam konteks ini, kebangkitan ini tidak hanya mencerminkan kembalinya partai politik berbasis Islam, tetapi juga menunjukkan bahwa masyarakat Muslim semakin aktif dalam menuntut suara dan hak politik mereka. Kebangkitan ini juga ditandai dengan meningkatnya partisipasi umat Islam dalam pemilu dan penyelenggaraan politik. Banyak tokoh Islam yang muncul sebagai calon legislatif, dan mereka berusaha untuk membawa suara umat ke dalam parlemen. Namun, tantangan baru muncul, terutama terkait dengan bagaimana merumuskan agenda politik yang inklusif dan dapat menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya segmen tertentu. Ini menuntut partai-partai Islam untuk lebih responsif terhadap perubahan sosial dan keinginan masyarakat yang lebih beragam, sehingga mereka dapat menjaga relevansi dan dukungan dari pemilih (Anisah, et al., 2023).

Institusi Politik Islam dan Representasi Umat

1. Partai Politik Berbasis Islam: Ideologi dan Agenda

Partai politik berbasis Islam memainkan peran penting dalam politik Indonesia dengan mengusung ideologi yang mengedepankan nilai-nilai Islam. Mereka berupaya untuk menyusun agenda yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip Islam dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebijakan sosial. Dalam hal ini, partai-partai ini sering kali mengklaim bahwa mereka adalah perwakilan yang sah dari suara umat Islam,

dan berusaha untuk mengintegrasikan aspirasi tersebut ke dalam kebijakan publik. Namun, tantangan yang dihadapi adalah beragamnya interpretasi atas nilai-nilai Islam itu sendiri, di mana masing-masing partai memiliki pendekatan yang berbeda terkait dengan bagaimana seharusnya nilai-nilai tersebut diterapkan dalam konteks politik dan hukum.

Keberagaman dalam interpretasi nilai-nilai Islam ini menciptakan tantangan tersendiri bagi partai-partai politik berbasis Islam. Setiap partai sering kali memiliki visi dan misi yang berbeda, yang dapat menyebabkan fragmentasi di kalangan pemilih Muslim. Dalam situasi ini, penting bagi partai-partai tersebut untuk menjalin dialog dan kolaborasi, baik di antara mereka sendiri maupun dengan kelompok-kelompok lain, untuk menciptakan agenda politik yang lebih inklusif dan representatif. Membangun konsensus di antara partai-partai Islam mengenai isu-isu kunci dapat membantu memperkuat posisi mereka dalam politik dan meningkatkan daya tarik mereka di mata masyarakat luas.

2. *Organisasi Keagamaan sebagai Aktor Politik*

Organisasi keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, juga berfungsi sebagai aktor politik yang signifikan. Mereka tidak hanya berfokus pada bidang keagamaan, tetapi juga aktif dalam memberikan kontribusi dalam arena politik. Dengan jaringan yang luas dan pengaruh yang besar di masyarakat, organisasi-organisasi ini sering kali menjadi penggerak dalam advokasi kebijakan publik dan memberikan suara bagi umat. Hal ini menciptakan sinergi antara organisasi keagamaan dan partai politik, di mana keduanya saling mendukung untuk mencapai tujuan yang lebih besar dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Peran organisasi keagamaan dalam politik juga mencerminkan kompleksitas hubungan antara agama dan negara di Indonesia. Dalam banyak kasus, organisasi-organisasi ini berfungsi sebagai jembatan antara aspirasi umat dan kebijakan pemerintah, membantu memastikan bahwa suara umat Islam didengar dalam proses pengambilan keputusan. Namun, hubungan ini tidak selalu mulus, terkadang terdapat ketegangan antara elite politik dan organisasi keagamaan mengenai bagaimana seharusnya kebijakan publik dirumuskan. Dalam situasi ini, dialog dan kerja sama yang konstruktif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan umat Islam dapat terwakili dengan baik.

3. *Hubungan antara Ulama dan Elite Politik*

Hubungan antara ulama dan elite politik di Indonesia sering kali bersifat simbiosis. Ulama memberikan legitimasi religius kepada politisi, sementara elite politik mencari dukungan dari ulama untuk memperkuat posisi mereka di mata masyarakat. Dalam banyak kasus, dukungan dari ulama dapat menjadi faktor

penentu dalam keberhasilan politik, terutama dalam pemilu. Namun, hubungan ini tidak selalu berjalan mulus. Kadang-kadang, terdapat ketegangan ketika pandangan politik ulama tidak sejalan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ini menciptakan tantangan bagi politisi untuk menjaga keseimbangan antara memenuhi aspirasi umat dan memenuhi tuntutan politik praktis.

Lebih jauh, ketergantungan antara ulama dan politisi ini juga dapat memunculkan dilema etis. Di satu sisi, ulama memiliki kewajiban moral untuk menyampaikan kebenaran dan membela kepentingan umat. Di sisi lain, mereka juga berhadapan dengan realitas politik yang sering kali mengharuskan mereka untuk mengambil posisi yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip keagamaan. Dalam konteks ini, penting bagi para ulama untuk tetap menjaga integritas dan independensi mereka, sambil tetap berkontribusi dalam proses politik yang lebih luas. Dialog terbuka dan saling menghormati antara ulama dan elite politik menjadi kunci untuk menciptakan hubungan yang produktif (Jamin, et al., 2024).

Islam dan Demokrasi: Kompatibilitas dan Ketegangan

1. Nilai-nilai Islam yang Mendukung Demokrasi

Beberapa nilai Islam, seperti keadilan, musyawarah, dan persamaan, sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks ini, banyak pemikir Islam yang berargumen bahwa Islam dan demokrasi dapat saling melengkapi. Misalnya, prinsip musyawarah (syura) dalam Islam dapat diterjemahkan ke dalam praktik konsultasi dalam sistem demokrasi. Namun, meskipun ada kesamaan ini, implementasi nilai-nilai tersebut dalam konteks politik sering kali menghadapi tantangan besar, terutama ketika terdapat interpretasi yang berbeda mengenai bagaimana prinsip-prinsip tersebut seharusnya diterapkan.

Perdebatan mengenai kompatibilitas antara Islam dan demokrasi sering kali mencerminkan keragaman pandangan di kalangan umat Islam itu sendiri. Beberapa kelompok berpendapat bahwa pemahaman yang lebih liberal terhadap ajaran Islam dapat mendukung praktik demokrasi yang lebih baik, sementara kelompok lain mungkin lebih konservatif dan menolak ide-ide yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Ini menunjukkan bahwa penting untuk menciptakan ruang bagi dialog yang konstruktif di dalam komunitas Muslim, sehingga berbagai pandangan dapat dibahas secara terbuka dan saling menghormati.

2. Tantangan Penerapan Prinsip Syura dalam Sistem Demokrasi

Penerapan prinsip syura dalam sistem demokrasi sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam hal bagaimana mengambil keputusan yang melibatkan banyak pihak. Perbedaan interpretasi mengenai syura dan

bagaimana proses pengambilan keputusan seharusnya dilakukan dapat menimbulkan konflik. Selain itu, dalam praktiknya, sering kali terjadi dominasi suara mayoritas yang dapat mengabaikan hak-hak kelompok minoritas. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana prinsip syura dapat diintegrasikan ke dalam mekanisme demokrasi yang ada, dan bagaimana menjaga keseimbangan antara kepentingan mayoritas dan perlindungan hak-hak kelompok minoritas.

Di sisi lain, penting untuk mengingat bahwa penerapan prinsip syura tidak hanya berkaitan dengan cara pengambilan keputusan, tetapi juga dengan bagaimana mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi dan keterlibatan dalam proses politik. Upaya untuk meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai syura dan musyawarah dapat membantu membangun masyarakat yang lebih demokratis dan inklusif. Dalam konteks ini, pendidikan politik yang berbasis pada nilai-nilai Islam dapat menjadi alat yang efektif untuk menciptakan pemilih yang lebih kritis dan terlibat, sehingga memperkuat demokrasi di Indonesia.

3. *Perdebatan antara Formalisasi Syariat dan Pluralisme Hukum*

Perdebatan mengenai apakah syariat harus dijadikan hukum positif ataukah tetap dalam ranah moral adalah isu yang sangat kompleks di Indonesia. Di satu sisi, ada kelompok yang berargumen bahwa penerapan syariat dalam hukum positif akan memastikan keadilan dan ketaatan kepada nilai-nilai Islam. Di sisi lain, ada pula yang menekankan pentingnya pluralisme hukum di Indonesia yang multikultural, di mana penerapan syariat dapat mengakibatkan eksklusivitas terhadap kelompok-kelompok non-Muslim. Ini menciptakan ketegangan dalam masyarakat, di mana perdebatan antara formalitas syariat dan pluralisme hukum terus berlanjut, menuntut dialog dan kompromi yang konstruktif.

Perdebatan ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh negara dalam menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk mengedepankan pendekatan yang inklusif, di mana semua kelompok, baik mayoritas maupun minoritas, merasa diakomodasi dalam kebijakan publik. Dialog antaragama dan kolaborasi antara berbagai elemen masyarakat menjadi krusial untuk menciptakan ruang bagi perbedaan pendapat dan mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak (Taufikurrahman, et al., 2024).

Politik Identitas dan Eksklusivisme Agama

1. Fenomena Politisasi Agama dalam Pemilu

Politisasi agama menjadi fenomena yang menonjol dalam konteks pemilu di Indonesia. Identitas agama sering kali digunakan sebagai alat mobilisasi suara, di mana calon-calon politik berusaha menarik dukungan dengan mengedepankan simbol-simbol keagamaan. Dalam banyak kasus, hal ini menciptakan polaritas di masyarakat, di mana pemilih terbelah antara kandidat yang dianggap mewakili kepentingan agama tertentu. Fenomena ini dapat menimbulkan ketegangan sosial, terutama ketika identitas agama digunakan untuk menyerang atau mendiskreditkan kelompok lain. Kondisi ini juga mengakibatkan munculnya tantangan bagi partai-partai politik untuk menjaga integritas dan menghindari perpecahan di kalangan basis pemilih mereka.

Dalam usaha untuk mendapatkan dukungan dari pemilih berbasis agama, beberapa partai mungkin terjebak dalam retorika yang memecah belah, yang pada gilirannya dapat merusak hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk menyadari risiko yang dihadapi dan berupaya untuk menciptakan narasi yang lebih inklusif, yang dapat memperkuat persatuan di tengah keragaman.

2. Dampak Politik Identitas terhadap Integrasi Sosial

Dampak dari politik identitas ini tidak dapat diabaikan, karena dapat mengakibatkan fragmentasi sosial yang serius. Ketika politik identitas mendominasi, kelompok-kelompok tertentu mungkin merasa terpinggirkan atau terancam, yang dapat merusak integrasi sosial yang telah dibangun. Keterasingan ini berpotensi menimbulkan konflik antar kelompok, memperburuk ketegangan yang sudah ada. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengatasi dampak politik identitas ini agar dapat menciptakan harmoni dan persatuan di antara berbagai kelompok dalam masyarakat yang beragam.

Dalam konteks ini, peran pendidikan dan dialog antaragama sangat penting. Program-program yang mempromosikan pemahaman dan toleransi antaragama dapat membantu membangun rasa saling menghormati dan mengurangi ketegangan. Selain itu, keterlibatan semua elemen masyarakat dalam proses politik, termasuk kelompok minoritas, sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan menghindari marginalisasi. Dengan menciptakan ruang bagi semua suara untuk didengar, kita dapat memperkuat integrasi sosial dan membangun masyarakat yang lebih harmonis.

3. Strategi Inklusif dalam Meredam Eksklusivisme Keagamaan

Untuk meredam eksklusivisme yang muncul akibat politik identitas, dibutuhkan strategi inklusif yang melibatkan dialog antaragama dan promosi

nilai-nilai toleransi. Upaya ini penting untuk menciptakan ruang bagi perbedaan pandangan dan saling menghormati, sehingga dapat membangun solidaritas di antara berbagai kelompok.

Selain itu, program-program pendidikan yang menekankan pentingnya toleransi dan kerjasama antaragama juga dapat berperan besar dalam memperkuat integrasi sosial dan mengurangi ketegangan. Penting juga untuk mendorong partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat dalam proses politik, sehingga berbagai suara dapat terwakili. Dengan menciptakan platform yang memungkinkan dialog terbuka antara kelompok-kelompok yang berbeda, kita dapat mengurangi ketegangan dan membangun pemahaman yang lebih baik. Ini tidak hanya akan menguntungkan masyarakat Muslim, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia, dengan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan harmonis (Febriansyah, et al., 2024).

Peran Islam dalam Formulasi Kebijakan Publik

1. Advokasi Kebijakan Berbasis Nilai Keislaman

Kelompok-kelompok Islam di Indonesia aktif dalam advokasi kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai keislaman. Mereka berupaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dalam berbagai isu, mulai dari pendidikan hingga kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, nilai-nilai keislaman sering kali menjadi landasan moral untuk mendorong kebijakan yang lebih adil dan berkeadilan. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa kebijakan tersebut juga memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segmen tertentu. Hal ini mengharuskan kelompok-kelompok Islam untuk beradaptasi dan berkolaborasi dengan aktor-aktor lain dalam proses pengambilan keputusan.

Lebih jauh, advokasi kebijakan berbasis nilai keislaman juga menghadapi tantangan dalam hal legitimasi. Ada kalanya kelompok-kelompok ini berhadapan dengan skeptisisme dari pihak-pihak yang tidak sejalan atau yang menganggap bahwa penerapan nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok non-Muslim. Oleh karena itu, penting bagi kelompok-kelompok Islam untuk dapat mengkomunikasikan visi dan misi mereka secara jelas dan transparan.

2. Respons Negara terhadap Tuntutan Kelompok Islam

Respons negara terhadap tuntutan kelompok Islam sangat bervariasi. Dalam banyak kasus, pemerintah berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara memenuhi aspirasi kelompok Islam dan menjaga stabilitas sosial. Ini menciptakan dinamika yang kompleks, di mana kebijakan yang diambil sering kali dipengaruhi oleh tekanan dari berbagai pihak. Dalam beberapa situasi, respons negara bisa berupa penerapan kebijakan yang mendukung aspirasi

kelompok Islam, sementara dalam situasi lain, pemerintah mungkin merasa perlu untuk menahan diri agar tidak memicu ketegangan di masyarakat (Efendi, 2024). Ini menciptakan tantangan bagi semua pihak untuk menemukan solusi yang dapat diterima bersama.

SIMPULAN

Islam sebagai sistem nilai yang komprehensif memiliki peran signifikan dalam membentuk arah kehidupan bernegara, baik dari aspek politik maupun sosial. Dalam ranah politik, Islam tidak hanya hadir sebagai sumber etika dan moral, tetapi juga sebagai kekuatan ideologis yang memengaruhi partisipasi politik, pembentukan kebijakan publik, dan dinamika demokrasi di Indonesia. Sementara itu, dalam dimensi sosial, Islam berfungsi sebagai fondasi solidaritas, identitas kolektif, dan mekanisme keadilan sosial melalui institusi keagamaan dan praktik keseharian umat.

Namun, interaksi antara nilai-nilai Islam dan sistem negara modern tidak selalu berjalan mulus; terdapat ketegangan antara idealisme keislaman dan realitas sosial politik yang kompleks, seperti pluralisme, sekularisasi, dan politik identitas. Oleh karena itu, pendekatan sosiologis terhadap hubungan Islam dan negara menjadi penting untuk memahami bagaimana agama dapat berkontribusi secara konstruktif dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkeadilan, tanpa kehilangan esensi spiritualnya.

Diperlukan penguatan literasi politik dan sosial berbasis nilai-nilai Islam yang moderat dan inklusif agar umat Islam dapat berperan aktif dalam kehidupan bernegara tanpa terjebak dalam eksklusivisme atau politisasi agama yang sempit.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, Nia, Maryamah Maryamah, Lidia Purnama, Levi Lauren Liza, and Nabila Khoirunnisa. "Peran Orang Arab Dalam Sejarah Perkembangan Agama Islam Di Indonesia." *Jurnal Multidisipliner Bharasumba* 2, no. 04 (2023): 316–26. <https://doi.org/10.62668/bharasumba.v2i04.794>.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Efendi, Sumardi. "Prinsip Syura Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam." *Jurnal Riset Hukum Kenegaraan Dan Politik* 3, no. 1 (2024): 69–78. <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo>.
- Febriansyah, Bilal Ahmad, Ilham Manando, and Angga Wira Kusuma. "Politik Identitas di Indonesia: Antara Nasionalisme dan Agama." *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 07, no. 1 (2024).
- Jamin, M. Irsyad, Eli Jamilah Mihardja, and Siti Komsiah. "Pemikiran Dalam Studi Budaya: Analisis Ideologi, Hegemoni, Dan Ekonomi Politik Dalam Representasi Islam Di Industri Hollywood." *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 8, no. 2 (2024): 475–88. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/3979>.
- Khamim, Siti, Iswanti, Nuryanti Siregar, and Yusri Yaldi. "Pengaruh Dan Tantangan Pendidikan Agama Islam Dalam Dinamika Politik Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Reseach* 4, no. 2 (2024): 2027–42.
- Kusmadina, Bela, Asa Khairunnisa, and Ani. "Kajian Studi Kelayakan Bisnis Melalui Pendekatan Studi Pustaka : Konsep , Metode , Dan Implementasi." *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 5 (2025): 9604–12.
- Taufikurrahman, Aditya Satria Wijaya, M. Mansur, and Ahmad Wiyono. "Demokrasi Kontestasi Pemilu Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2024): 36–44.